



Nomor : 387/DJU.1/UND.RA1.8/IX/2025 Jakarta, 2 September 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Koordinasi Tindak Lanjut Revisi Anggaran
dan Volume Kegiatan Prioritas Nasional
Satker Pengadilan Tingkat Pertama
Di lingkungan Peradilan Umum

Yth. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
(Daftar Terlampir)

Menindaklanjuti surat kami Nomor 1405/DJU.1/RA1.8/VIII/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Hal Revisi Kegiatan Prioritas Nasional pada Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2025 Di lingkungan Peradilan Umum, dengan ini disampaikan bahwa data Satuan Kerja yang mengusulkan revisi anggaran dan volume kegiatan Prioritas Nasional yang kami terima sampai dengan tanggal 2 September 2025 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) Satker (data terlampir). Untuk itu bagi Satuan Kerja tersebut kami mengundang untuk hadir melalui *zoom meeting* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 3 September 2025
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai
Link Zoom : <https://bit.ly/revisipronas>
Meeting Id : 851 4286 8291
Passcode : REVPRO25

*Mohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai
*Masing – masing Satuan Kerja dimohon hanya bergabung dengan 1 (satu) akun *zoom* saja, dengan *id zoom* : (kode satker)-Nama Satker.

Agenda : Koordinasi Tindak Lanjut Revisi Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI**
KURNIA ARRY SOELAKSONO 



DAFTAR SATUAN KERJA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA :

- 1 PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
- 2 PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE
- 3 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
- 4 PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE
- 5 PENGADILAN NEGERI SIGLI
- 6 PENGADILAN NEGERI BEUREUN
- 7 PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON
- 8 PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE
- 9 PENGADILAN NEGERI TAKENGON
- 10 PENGADILAN NEGERI LANGSA
- 11 PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN
- 12 PENGADILAN NEGERI CALANG
- 13 PENGADILAN NEGERI SINABANG
- 14 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN
- 15 PENGADILAN NEGERI SINGKEL
- 16 PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
- 17 PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
- 18 PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN
- 19 PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
- 20 PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
- 21 PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
- 22 PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
- 23 PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
- 24 PENGADILAN NEGERI STABAT
- 25 PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
- 26 PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
- 27 PENGADILAN NEGERI BALIGE
- 28 PENGADILAN NEGERI PADANG
- 29 PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
- 30 PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR
- 31 PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI
- 32 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
- 33 PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
- 34 PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
- 35 PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
- 36 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
- 37 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
- 38 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
- 39 PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
- 40 PENGADILAN NEGERI DUMAI
- 41 PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
- 42 PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAAN
- 43 PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
- 44 PENGADILAN NEGERI BATAM
- 45 PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG
- 46 PENGADILAN NEGERI MENTOK
- 47 PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT
- 48 PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
- 49 PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
- 50 PENGADILAN NEGERI BANGKO
- 51 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
- 52 PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR
- 53 PENGADILAN NEGERI BENGKULU
- 54 PENGADILAN NEGERI CURUP
- 55 PENGADILAN NEGERI MANNA
- 56 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
- 57 PENGADILAN NEGERI TAIS
- 58 PENGADILAN NEGERI KEPAHANG
- 59 PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
- 60 PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG



- 61 PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU
- 62 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
- 63 PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
- 64 PENGADILAN NEGERI METRO
- 65 PENGADILAN NEGERI KOTABUMI
- 66 PENGADILAN NEGERI KALIANDA
- 67 PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
- 68 PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
- 69 PENGADILAN NEGERI SUKADANA
- 70 PENGADILAN NEGERI SERANG
- 71 PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG
- 72 PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- 73 PENGADILAN NEGERI BANDUNG
- 74 PENGADILAN NEGERI CIKARANG
- 75 PENGADILAN NEGERI GARUT
- 76 PENGADILAN NEGERI CIAMIS
- 77 PENGADILAN NEGERI KARAWANG
- 78 PENGADILAN NEGERI BOGOR
- 79 PENGADILAN NEGERI CIANJUR
- 80 PENGADILAN NEGERI CIREBON
- 81 PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
- 82 PENGADILAN NEGERI KUNINGAN
- 83 PENGADILAN NEGERI CIBADAK
- 84 PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
- 85 PENGADILAN NEGERI DEPOK
- 86 PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG JAWA BARAT
- 87 PENGADILAN NEGERI SEMARANG
- 88 PENGADILAN NEGERI TEGAL
- 89 PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
- 90 PENGADILAN NEGERI PATI
- 91 PENGADILAN NEGERI PEMALANG
- 92 PENGADILAN NEGERI DEMAK
- 93 PENGADILAN NEGERI PURWODADI
- 94 PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN
- 95 PENGADILAN NEGERI JEPARA
- 96 PENGADILAN NEGERI BLORA
- 97 PENGADILAN NEGERI BATANG
- 98 PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
- 99 PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
- 100 PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
- 101 PENGADILAN NEGERI KLATEN
- 102 PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
- 103 PENGADILAN NEGERI CILACAP
- 104 PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
- 105 PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
- 106 PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI
- 107 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
- 108 PENGADILAN NEGERI SLEMAN
- 109 PENGADILAN NEGERI WONOSARI
- 110 PENGADILAN NEGERI WATES
- 111 PENGADILAN NEGERI SURABAYA
- 112 PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
- 113 PENGADILAN NEGERI JOMBANG
- 114 PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
- 115 PENGADILAN NEGERI JEMBER
- 116 PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
- 117 PENGADILAN NEGERI KEDIRI
- 118 PENGADILAN NEGERI NGANJUK
- 119 PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG
- 120 PENGADILAN NEGERI BLITAR
- 121 PENGADILAN NEGERI MALANG
- 122 PENGADILAN NEGERI LUMAJANG
- 123 PENGADILAN NEGERI BANGIL
- 124 PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN



125 PENGADILAN NEGERI MADIUN
126 PENGADILAN NEGERI PONOROGO
127 PENGADILAN NEGERI NGAWI
128 PENGADILAN NEGERI SUMENEP
129 PENGADILAN NEGERI SAMPANG
130 PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI
131 PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG JAWA TIMUR
132 PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
133 PENGADILAN NEGERI KETAPANG
134 PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
135 PENGADILAN NEGERI SANGGAU
136 PENGADILAN NEGERI SAMBAS
137 PENGADILAN NEGERI NGABANG
138 PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
139 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
140 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
141 PENGADILAN NEGERI SAMPIT
142 PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
143 PENGADILAN NEGERI KASONGAN
144 PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
145 PENGADILAN NEGERI TANJUNG
146 PENGADILAN NEGERI AMUNTAI
147 PENGADILAN NEGERI PLEIHARI
148 PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
149 PENGADILAN NEGERI BATULICIN
150 PENGADILAN NEGERI PENAJAM
151 PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
152 PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
153 PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
154 PENGADILAN NEGERI SANGATTA
155 PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO
156 PENGADILAN NEGERI TAHUNA
157 PENGADILAN NEGERI TONDANO
158 PENGADILAN NEGERI BITUNG
159 PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI
160 PENGADILAN NEGERI AMURANG
161 PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
162 PENGADILAN NEGERI MARISA
163 PENGADILAN NEGERI PALU
164 PENGADILAN NEGERI POSO
165 PENGADILAN NEGERI PARIGI
166 PENGADILAN NEGERI MAMUJU
167 PENGADILAN NEGERI POLEWALI
168 PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
169 PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
170 PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE
171 PENGADILAN NEGERI BARRU
172 PENGADILAN NEGERI MAROS
173 PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
174 PENGADILAN NEGERI ENREKANG
175 PENGADILAN NEGERI PINRANG
176 PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
177 PENGADILAN NEGERI SENGKANG
178 PENGADILAN NEGERI BANTA ENG
179 PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
180 PENGADILAN NEGERI PALOPO
181 PENGADILAN NEGERI MASAMBA
182 PENGADILAN NEGERI MALILI
183 PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI
184 PENGADILAN NEGERI BAU-BAU
185 PENGADILAN NEGERI UNA AHA
186 PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
187 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
188 PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG



- 189 PENGADILAN NEGERI BANGLI
- 190 PENGADILAN NEGERI MATARAM
- 191 PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA
- 192 PENGADILAN NEGERI SELONG
- 193 PENGADILAN NEGERI DOMPU
- 194 PENGADILAN NEGERI PRAYA
- 195 PENGADILAN NEGERI KUPANG
- 196 PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
- 197 PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU
- 198 PENGADILAN NEGERI LARANTUKA
- 199 PENGADILAN NEGERI BAJAWA
- 200 PENGADILAN NEGERI KALABAHI
- 201 PENGADILAN NEGERI LEMBATA
- 202 PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
- 203 PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
- 204 PENGADILAN NEGERI OELAMASI
- 205 PENGADILAN NEGERI AMBON
- 206 PENGADILAN NEGERI DOBO
- 207 PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA
- 208 PENGADILAN NEGERI MASOHI
- 209 PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
- 210 PENGADILAN NEGERI SANANA
- 211 PENGADILAN NEGERI BOBONG
- 212 PENGADILAN NEGERI TERNATE
- 213 PENGADILAN NEGERI TOBELO
- 214 PENGADILAN NEGERI SOASIU
- 215 PENGADILAN NEGERI MERAUKE
- 216 PENGADILAN NEGERI BIAK
- 217 PENGADILAN NEGERI SERUI
- 218 PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA
- 219 PENGADILAN NEGERI SORONG
- 220 PENGADILAN NEGERI FAK FAK
- 221 PENGADILAN NEGERI MUARO
- 222 PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
- 223 PENGADILAN NEGERI TEBO
- 224 PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI**

KURNIA ARRY SOELAKSONO



